

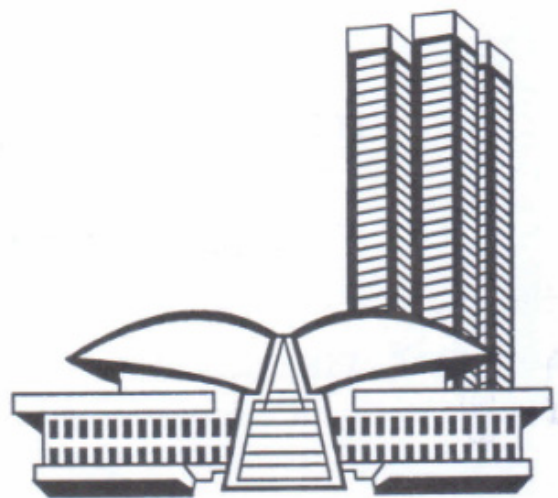
Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 4, Desember 2017

ISSN 0853-9316

- MENILAI KESIAPAN MIANGAS MERESPON DAMPAK AKTIVITAS TERORIS PRO-ISIS DI FILIPINA SELATAN
oleh: Poltak Partogi Nainggolan
- PENGATURAN EKONOMI KREATIF GUNA MENGEMBANGKAN SUMBER EKONOMI BARU
oleh: Sutriyanti
- DINAMIKA SISTEM PRODUKSI DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN REVITALISASI INDUSTRI MENUJU SWASEMBADA GULA
oleh: Juli Panglima Saragih
- PERMASALAHAN DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN DAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA PONTIANAK
oleh: Mandala Harefa
- PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI PUSKESMAS: Studi Kasus di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
oleh: Tri Rini Puji Lestari



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 4, Desember 2017

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● MENILAI KESIAPAN MIANGAS MERESPON DAMPAK AKTIVITAS TERORIS PRO-ISIS DI FILIPINA SELATAN <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i>	255-268
● PENGATURAN EKONOMI KREATIF GUNA MENGEMBANGKAN SUMBER EKONOMI BARU <i>oleh: Sutriyanti</i>	269-280
● DINAMIKA SISTEM PRODUKSI DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN REVITALISASI INDUSTRI MENUJU SWASEMBADA GULA <i>oleh: Juli Panglima Saragih</i>	281-300
● PERMASALAHAN DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN DAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA PONTIANAK <i>oleh: Mandala Harefa</i>	301-316
● PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI PUSKESMAS: STUDI KASUS DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR <i>oleh: Tri Rini Puji Lestari</i>	317-328

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Edisi Desember 2017. Berbagai isu yang disajikan dalam Edisi ini sangat beragam, baik bidang hubungan internasional, hukum, kesehatan masyarakat maupun ekonomi. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun penulis dari luar Pusat Penelitian.

Tulisan pertama berjudul “Menilai Kesiapan Miangas Merespon Dampak Aktivitas Teroris Pro-ISIS Di Filipina Selatan”, yang ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan dari Pusat Penelitian. Artikel ini mengulas tentang Eskalasi konflik berskala rendah dan terdesaknya kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di Filipina Selatan oleh operasi militer Presiden Duterte dapat membawa dampak ke Miangas. Pulau terdepan Indonesia yang perairannya berbatasan langsung itu diantisipasi aparat Indonesia dapat dijadikan tempat pelarian dan basis persembunyian baru Kelompok Abu Sayyaf, Maute dan pro-ISIS lain, dengan kehadiran teroris asal mancanegara. Penelitian ini menganalisis sejauh mana ancaman yang ada, dengan mewawancarai banyak pihak dan melakukan observasi lapangan, dengan memakai perspektif keamanan tradisional dan non-tradisional. Penelitian dilakukan selama Januari-Juni 2017, dengan menggunakan metodologi kualitatif dalam analisis datanya. Temuan penelitian mengungkapkan kerawanan Pulau Miangas dari berbagai kemungkinan ancaman serangan terorisme pengikut ISIS di Filipina Selatan dan perkembangan konflik berskala rendah di sana. Sekalipun terdapat potensi penduduk untuk menangkalnya, namun hambatan konektivitas Pulau Miangas dengan pulau-pulau lain di Indonesia, keterbatasan infrastruktur dan ketidaktersediaan alutsista, serta lemahnya mentalitas dan disiplin aparat pemerintahan dan keamanan di sana, akan menyulitkan mereka untuk dapat merespons secara cepat dan efektif setiap serangan terorisme para pengikut ISIS di Filipina Selatan.

Artikel kedua adalah tentang “Pengaturan Ekonomi Kreatif Guna Mengembangkan Sumber Ekonomi Baru”, yang ditulis oleh Sutriyanti dari Pusat Perundang-undangan Badan Keahlian DPR RI. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Ekonomi kreatif dapat menjadi sumber ekonomi baru yang perlu dikembangkan di dalam perekonomian nasional, karena dapat dijadikan sebagai sosial enterprise bagi masyarakat di suatu daerah dan memberikan kontribusi ekonomi nasional yang besar. Namun, dalam pengembangan ekonomi kreatif terdapat berbagai permasalahan kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Namun demikian, regulasi yang ada saat ini dirasa belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi kreatif. Sehingga tulisan ini untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan yang ada terkait pengembangan ekonomi kreatif guna menemukan hal-hal perlu pengaturan ke depan terkait permasalahan pengembangan ekonomi kreatif. Penyusunan tulisan ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dalam menjawab permasalahan diatas. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa regulasi yang masih belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi kreatif, karena sifat ekonomi kreatif yang khusus. Selain itu, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum ada regulasi yang mengatur dan melindungi jenis ekonomi yang bertumpu pada kreativitas ini. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat membuat peraturan yang mampu menciptakan kondisi ekonomi yang baik dan memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Tulisan ketiga membahas isu tentang revitalisasi industri gula dengan judul “Dinamika Sistem Produksi Dan Perspektif Kebijakan Revitalisasi Industri Menuju Swasembada Gula”, yang ditulis oleh Juli Panglima Saragih. Permasalahan pergulaan di Indonesia terkait langsung dengan industri gula nasional. Pengembangan industri gula merupakan persoalan multi-dimensi atau lintas-sektor. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mengembangkan industri gula adalah strategi revitalisasi. Revitalisasi tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan kebijakan di sisi hulu (on-farm) maupun sisi hilir (off-farm). Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis dengan menganalisa data, informasi, dan pemikiran yang relevan dalam upaya revitalisasi industri gula. Hasil analisis menyimpulkan bahwa industri gula eksisting memiliki kelemahan dengan ketidakefisienan sebagian besar pabrik gula terutama milik BUMN PT Perkebunan Nusantara pada sisi hilir (off-farm). Terdapat juga persoalan dari sisi hulu (on-farm) yakni antara lain dengan lambannya pertumbuhan lahan tebu sampai saat ini di luar Pulau Jawa. Ekstensifikasi lahan tebu menjadi

syarat dalam peningkatan produksi tebu sebagai bahan baku industri gula sebagai pasokan bahan baku tebu dengan rendemen yang tinggi. Strategi revitalisasi merupakan pilihan yang tepat guna mencapai swasembada gula tahun 2019 dan surplus gula untuk tujuan ekspor.

Tulisan keempat ditulis oleh Mandala Harefa dengan judul "Permasalahan Dan Efektifitas Kebijakan Dak Sebagai Instrumen Pembangunan Infrastruktur Kota Pontianak". Konsekwensi digulirkannya otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan setiap dana tranfer dari pemerintah pusat. Salah satu bentuk dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Adapun permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mendapatkan gambaran secara rinci bagaimana pengelolaan hasil pendapatan daerah dan peran DAK yang telah berjalan selama ini yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam pemanfaatan DAK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Kota Pontianak sebagai lokus penelitian secara kapasitas fiskal dinilai sangat baik. Namun dalam realisasi pemanfaatan DAK yang merupakan bagian penerimaan, masih menghadapi permasalahan teknis. Permasalahan sering berubahnya regulasi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terkait proses pencairan dan program sebagai menu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tulisan tentang "Penanggulangan Penyakit Menular Di Puskesmas: Studi Kasus Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur" yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari dari Pusat Penelitian merupakan artikel penutup dalam edisi ini. Puskesmas sebagai upaya kesehatan masyarakat mempunyai Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M). Namun penyakit menular masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari lima provinsi yang jumlah kasus penyakit menularnya tinggi dengan kondisi sosial ekonominya masih rendah. Secara Epidemiologi kejadian penyakit merupakan hasil hubungan interaktif antara manusia dan perilakunya serta komponen lingkungan yang memiliki potensi penyakit. Rumusan masalah penelitian ini adalah jumlah kasus penyakit menular di masyarakat masih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di puskesmas di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian didapat bahwa sampai saat ini masih belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas di puskesmas menyebabkan upaya penanggulangan penyakit menular belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah hendaknya paham dengan kondisi penyakit menular di wilayahnya serta komitmen dan mengupayakan ketersediaan sumberdaya di puskesmas yang cukup dan berkualitas.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan September 2017. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS; Dr.phil. Yandry Kurniawan, M.Si; Prof. Dr. Ir. I Wayan Rusastra, M.S.; dan Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Desember 2017

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Poltak Partogi Nainggolan (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

MENILAI KESIAPAN MIANGAS MERESPON DAMPAK AKTIVITAS TERORIS PRO-ISIS DI FILIPINA SELATAN

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, hlm. 255-268

Eskalasi konflik berskala rendah dan terdesaknya kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di Filipina Selatan oleh operasi militer Presiden Duterte dapat membawa dampak ke Miangas. Pulau terdepan Indonesia yang perairannya berbatasan langsung itu diantisipasi aparat Indonesia dapat dijadikan tempat pelarian dan basis persembunyian baru Kelompok Abu Sayyaf, Maute dan pro-ISIS lain, dengan kehadiran teroris asal mancanegara. Penelitian ini menganalisis sejauh mana ancaman yang ada, dengan mewawancarai banyak pihak dan melakukan observasi lapangan, dengan memakai perspektif keamanan tradisional dan non-tradisional. Penelitian dilakukan selama Januari-Juni 2017, dengan menggunakan metodologi kualitatif dalam analisis datanya. Temuan penelitian mengungkapkan kerawanan Pulau Miangas dari berbagai kemungkinan ancaman serangan terorisme pengikut ISIS di Filipina Selatan dan perkembangan konflik berskala rendah di sana. Sekalipun terdapat potensi penduduk untuk menangkalnya, namun hambatan konektivitas Pulau Miangas dengan pulau-pulau lain di Indonesia, keterbatasan infrastruktur dan ketidaktersediaan alutsista, serta lemahnya mentalitas dan disiplin aparat pemerintahan dan keamanan di sana, akan menyulitkan mereka untuk dapat merespons secara cepat dan efektif setiap serangan terorisme para pengikut ISIS di Filipina Selatan.

Kata Kunci: terorisme, ISIS, FTFs, Filipina Selatan, Miangas, safe haven.

PENGATURAN EKONOMI KREATIF GUNA MENGEMBANGKAN SUMBER EKONOMI BARU

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, hlm. 269 - 280

Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Ekonomi kreatif dapat menjadi sumber ekonomi baru yang perlu dikembangkan di dalam perekonomian nasional, karena dapat dijadikan sebagai sosial enterprise bagi masyarakat di suatu daerah dan memberikan kontribusi ekonomi nasional yang besar. Namun, dalam pengembangan ekonomi kreatif terdapat berbagai permasalahan kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Namun demikian, regulasi yang ada saat ini dirasa belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi kreatif. Sehingga tulisan ini untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan yang ada terkait pengembangan ekonomi kreatif guna menemukan hal-hal perlu pengaturan ke depan terkait permasalahan pengembangan ekonomi kreatif. Penyusunan tulisan ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dalam menjawab permasalahan diatas. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa regulasi yang masih belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi kreatif, karena sifat ekonomi kreatif yang khusus. Selain itu, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum ada regulasi yang mengatur dan melindungi jenis ekonomi yang bertumpu pada kreativitas ini. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat membuat peraturan yang mampu menciptakan kondisi ekonomi yang baik dan memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Kata Kunci: pengaturan, ekonomi kreatif, sumber ekonomi baru

DINAMIKA SISTEM PRODUKSI DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN REVITALISASI INDUSTRI MENUJU SWASEMBADA GULA

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, hlm. 281- 300

Permasalahan pergulaan di Indonesia terkait langsung dengan industri gula nasional. Pengembangan industri gula merupakan persoalan multi-dimensi atau lintas-sektor. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mengembangkan industri gula adalah strategi revitalisasi. Revitalisasi tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan kebijakan di sisi hulu (on-farm) maupun sisi hilir (off-farm). Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis dengan menganalisa data, informasi, dan pemikiran yang relevan dalam upaya revitalisasi industri gula. Hasil analisis menyimpulkan bahwa industri gula eksisting memiliki kelemahan dengan ketidakefisienan sebagian besar pabrik gula terutama milik BUMN PT Perkebunan Nusantara pada sisi hilir (off-farm). Terdapat juga persoalan dari sisi hulu (on-farm) yakni antara lain dengan lambannya pertumbuhan lahan tebu sampai saat ini di luar Pulau Jawa. Ekstensifikasi lahan tebu menjadi syarat dalam peningkatan produksi tebu sebagai bahan baku industri gula sebagai pasokan bahan baku tebu dengan rendemen yang tinggi. Strategi revitalisasi merupakan pilihan yang tepat guna mencapai swasembada gula tahun 2019 dan surplus gula untuk tujuan ekspor.

Kata kunci: revitalisasi, industri gula, perkebunan tebu, rendemen.

PERMASALAHAN DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN DAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA PONTIANAK

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, hlm. 301 - 316

Konsekwensi digulirkannya otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan setiap dana tranfer dari pemerintah pusat. Salah satu bentuk dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Adapun permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mendapatkan gambaran secara rinci bagaimana pengelolaan hasil pendapatan daerah dan peran DAK yang telah berjalan selama ini yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam pemanfaatan DAK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Kota Pontianak sebagai lokus penelitian secara kapasitas fiskal dinilai sangat baik. Namun dalam realisasi pemanfaatan DAK yang merupakan bagian penerimaan, masih menghadapi permasalahan teknis. Permasalahan sering berubahnya regulasi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terkait proses pencairan dan program sebagai menu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kata kunci: Anggaran, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, infrastruktur, dan Transfer fiskal.

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI PUSKESMAS: Studi Kasus di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, hlm. 317 - 328

Puskesmas sebagai upaya kesehatan masyarakat mempunyai Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M). Namun penyakit menular masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari lima provinsi yang jumlah kasus penyakit menularnya tinggi dengan kondisi sosial ekonominya masih rendah. Secara Epidemiologi kejadian penyakit merupakan hasil hubungan interaktif antara manusia dan perilakunya serta komponen lingkungan yang memiliki potensi penyakit. Rumusan masalah penelitian ini adalah jumlah kasus penyakit menular di masyarakat masih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di puskesmas di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian didapat bahwa sampai saat ini masih belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas di puskesmas menyebabkan upaya penanggulangan penyakit menular belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah hendaknya paham dengan kondisi penyakit menular di wilayahnya serta komitmen dan mengupayakan ketersediaan sumberdaya di puskesmas yang cukup dan berkualitas.

Kata Kunci: Puskesmas, Penyakit Menular, Kebijakan Kesehatan Masyarakat.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Poltak Partogi Nainggolan (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

ASSESSING READINESS OF MIANGAS IN RESPONDING THE IMPACTS OF PRO-ISIS TERRORIST ACTIVITIES IN SOUTH PHILIPPINES

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, pp. 255 - 268

An escalation of low intensity conflict and an awkward position of pro-ISIS terrorists groups because of President Duterte's military operation could bring implications to Miangas. The island in the most northern part of Indonesia which has boundary with the Philippines in its waters has been anticipated by the country's authorities as an evacuated route which can be used as a new military base for the Abu Sayyaf, Maute groups and other pro-ISIS groups, which will attract more foreign terrorist fighters to come. The research in Miangas analyses the level of security threats by making with various parties and field observation by applying both traditional and non-traditional approaches. Field research conducted in January-July 2017 by adopting qualitative methodology in its data analysis. Its findings reveal vulnerabilities in Miangas from possible terrorist acts of pro-ISIS groups in South Philippines and the development of the low intensity conflicts. Although Miangas people has strong potentials to respond the threat, problem of connectivity of Miangas and other Indonesia's islands, poor infrastructure and the absence of main weapons, as well as low discipline and mentality of the state and security apparatus there will their capability to quick and effectively respond every pro-ISIS terrorist attacks from the South Philippines.

Keywords: terrorism, ISIS, FTFs, South Philippines, Miangas, safe haven.

REGULATING OF CREATIVE ECONOMY TO DEVELOP NEW ECONOMIC RESOURCES

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, pp. 269 -280

The creative economy is a concept to actualize sustainable creativity-based economic development. Creative economy can be a new economic source that needs to be developed in the national economy, because it can be used as a social enterprise for people in the area and to contribute a great national economy. However, in the development of creative economy there are various problems such as lack of quality of human resources, availability of raw materials, competitiveness, market access, and capital difficulties. The Government has issued Presidential Instruction Number 6 Year 2009 about Creative Economy Development, Presidential Regulation Number 6 Year 2015 about the Creative Economy Body, and Presidential Regulation Number 72 Year 2015 about Amendment to Presidential Regulation Number 6 Year 2015 about the Creative Economy Body. However, the current regulation is not yet able to overcome the problems of creative economy. So, this paper aims to find out more about existing arrangements related to the development of creative economy in order to find things need forward arrangement related issues of creative economic development. This paper is used a normative juridical approach in answering the above problems. The results of this paper show that the regulation is still not able to overcome the problems of creative economy, because of the special characteristic of creative economy. In addition, the existing regulations are sectoral and there is no regulation that regulates and protects the type of economy that relies on this creativity. Therefore, the government should be able to create regulations that can create good economic conditions and provide convenience to the creative economy.

Keywords: rule, creative economy, new economic resources

PRODUCTION SYSTEM DINAMIC AND POLICY PERSPECTIVE OF REVITALIZATION OF INDUSTRY FOR SELF-SUFFICIENCY OF SUGAR SUPPLY

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, pp. 281 - 300

Sugarcane problems in general can similarly go to sugarcane industry itself. Developing sugarcane industry has been multi-dimension and multi-sector problems as well. One strategy can be undertaken was to revitalize its industry. Sugarcane industry revitalization can successfully be achieved through supporting on down-stream policy, as well as up-stream policy. This study is a qualitative research by using descriptive-analysis method. This method aims to see and describe. This study explain that unefficiency production of sugarcane industry including in state own sugarcane industry impact on slower growth of sugar production while demand rise every year. This problems is also caused by slower growth of sugarcane crops productivity as well as slower growth of sugarcane plantation areas. Extension of plantation areas will be one of resolutions and increasing rendement level of sugarcane in the future. Revitalization strategy is better policy to overcome unefficiency production of most sugarcane industries. Self-sufficiency of sugarcane in 2019 should be achieved through multi-sector policies. In the longterm, those policy can expectedfully reach surplus of production as well as export into international sugarcane market.

Keywords: revitalization, sugarcane industry, sugarcane plantation, rendement.

PROBLEMS AND EFFECTIVENESS OF DAK POLICY AS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INSTRUMENTS IN PONTIANAK

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, pp. 301 - 316

The consequence of regional autonomy is that regions are given the authority to allocate every fund transfer from the central government. One form of the Balancing Fund is the Special Allocation Fund (DAK). The DAK is intended to fund special activities of regional affairs and also of a national priority. The issue raised in this study is to get a detailed picture of the management of regional income and the role of DAK that has taken place to date within the Government of Pontianak City and any problems faced by the City Government in the utilization of DAK. This research is a descriptive research with qualitative approach. Data obtained through interviews and FGDs. This research identifies that Pontianak as a research locus in fiscal capacity is considered very good. However, in the realization of utilization of DAK which is part of revenue, the City still face technical problems. The problem is of frequent changes in regulations in the current budget year related to disbursement processes and programs as menus that are not in accordance with regional needs.

Keywords: Budget, Balancing Fund, Local Own-source Revenue, Special Allocation Fund, Infrastructure, and Fiscal Transfer.

COUNTERMEASURES OF INFECTIOUS DISEASE IN PUSKESMAS: Case Study in Belu District, East Nusa Tenggara Province

Kajian Vol. 22, No. 4, Tahun 2017, pp. 317 - 328

Puskesmas as a public health effort has a Communicable Disease Control and Control Program (P2M). However, infectious diseases are still a major public health problem in Indonesia. East Nusa Tenggara (NTT) is one of five provinces where the number of infectious diseases is high with low socioeconomic conditions. Epidemiologically the incidence of disease is the result of an interactive relationship between humans and their behavior as well as environmental components that have potential diseases. The formulation of this research problem is the number of cases of communicable diseases in the community is still high. This research used qualitative method with case study at puskesmas in Belu Regency East Nusa Tenggara Province. The results obtained that until now there is still no specific law that regulates the prevention and control of infectious diseases. Limited human resources and facilities at the puskesmas cause efforts to control infectious diseases can not be implemented optimally. Therefore, the Government and the Regional Government should be aware of the infectious disease condition in their area as well as the commitment and strive for the availability of resources in the Puskesmas which is sufficient and qualified.

Keywords: Public Health Care, Infectious Diseases, Public Health Policy.